

Moderasi Kualitas Laporan Keuangan pada Kemandirian, Ketergantungan, Belanja Modal terhadap Kinerja Daerah

(Moderation of Financial Report Quality on Independence, Dependence, Capital Expenditure on Regional Performance)

Dwi Riski Rahmadhanty^{1*}, Amrie Firmansyah²

Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia^{1*}, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia²

dwi.127212020@stu.untar.ac.id¹, amriefirmansyah@upnvj.ac.id²



Article Riwayat Artikel

Diterima pada 4 September 2024

Revisi 1 pada 25 Oktober 2024

Revisi 2 pada 6 November 2024

Revisi 3 pada 25 November 2024

Disetujui pada 26 November 2024

Abstract

Purpose: This study aims to provide robust statistical evidence on the impact of regional government independence, dependency on central government funding, and capital expenditure on the financial performance of regional governments in South Sumatra Province from 2007 to 2021.

Methodology: The study utilizes secondary data from financial reports of district and city governments in South Sumatra for the period 2007-2021, obtained through the official websites of the Supreme Audit Agency (BPK) and the Directorate General of Fiscal Balance.

Results: The findings reveal that regional government independence, central government dependency, and capital expenditure individually have a negative impact on the financial performance of South Sumatra's regional governments. Moderation analysis shows that high-quality financial reporting strengthens the positive impact of regional independence and dependency on financial performance, suggesting that accurate and transparent reporting may help maximize the benefits of fiscal autonomy and central transfers.

Limitations: This study is limited to secondary data from financial reports, which may not capture all factors affecting regional financial performance. Additionally, the focus on district and city governments in South Sumatra may limit the generalizability of the findings to other regions.

Contribution: This study offers a valuable reference for optimizing regional financial strategies to enhance fiscal autonomy and efficiency in local governments.

Keywords: *Capital Expenditure, Financial Performance, Level of Independence, Level of Dependence, Quality of Financial Reports.*

How to Cite: Rahmadhanty, D, R., Firmansyah, A. (2025). Moderasi Kualitas Laporan Keuangan pada Kemandirian, Ketergantungan, Belanja Modal terhadap Kinerja Daerah. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 6(2), 327-343.

1. Pendahuluan

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah aspek yang esensial dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan publik dan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diharuskan mengelola keuangan dengan asas otonomi yang luas dan penuh tanggung jawab untuk mendorong kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang RI, 2014). Meskipun penerapan otonomi daerah sudah berjalan, banyak daerah yang masih belum menunjukkan kinerja keuangan optimal. Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan bahwa ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat masih tinggi, menandakan bahwa

upaya kemandirian fiskal belum sepenuhnya berhasil (Badan Pemeriksa Keuangan, 2024). Kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik seharusnya mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Firmansyah et al. (2024) menyoroti bahwa meskipun PAD seharusnya menjadi sumber utama pendapatan, banyak daerah belum mampu mengelola dan memaksimalkan potensi ini secara efisien. Hal ini menjadi indikator bahwa perencanaan keuangan jangka panjang dan kemampuan inovasi dalam pengelolaan PAD masih lemah di berbagai daerah.

Kualitas laporan keuangan adalah tolok ukur penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi tanda bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku, yang pada gilirannya mencerminkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Namun, penelitian Firmansyah et al. (2022) menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah gagal mencapai opini WTP. Kegagalan ini mengindikasikan adanya masalah dalam sistem pelaporan keuangan, seperti kelemahan dalam pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi. Kinerja keuangan tidak hanya diukur dari sekadar angka-angka, tetapi juga melalui konsistensi dan integritas pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Pencapaian opini WTP menjadi indikator seberapa baik pemerintah daerah mampu mengelola keuangannya dengan transparan dan bertanggung jawab. Ketidakmampuan mencapai opini WTP menunjukkan tantangan signifikan dalam pengelolaan keuangan yang masih harus diatasi.

Laporan keuangan yang berkualitas berkontribusi pada perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik di pemerintahan. Kualitas laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai indikator akuntabilitas, tetapi juga berperan dalam menumbuhkan kepercayaan publik dan mendukung evaluasi kinerja yang lebih objektif. Namun, data empiris menunjukkan bahwa pencapaian kualitas laporan keuangan belum merata di seluruh daerah, sehingga perlu upaya perbaikan yang berkelanjutan dalam sistem pelaporan dan manajemen keuangan.

Rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah, yang masih menjadi tantangan signifikan di berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah daerah seharusnya memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efisien dan akuntabel agar dapat mendukung pembangunan berkelanjutan serta menyediakan layanan publik yang optimal. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah belum mampu memenuhi ekspektasi ini. Laporan keuangan yang tidak mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencerminkan adanya masalah mendasar dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan. Permasalahan ini dapat mencakup kelemahan dalam pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi, hingga ketidakmampuan dalam menerapkan praktik keuangan yang transparan dan akuntabel (Badan Pemeriksa Keuangan, 2024).

Dalam perspektif teori keagenan, pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang ditunjuk oleh masyarakat (prinsipal) untuk mengelola anggaran publik dengan amanah dan tanggung jawab. Teori keagenan menekankan bahwa hubungan antara agen dan prinsipal harus didasari oleh akuntabilitas dan transparansi agar kepentingan masyarakat dapat terwakili dengan baik (Jensen & Meckling, 1976). Namun, sering kali terjadi asimetri informasi, di mana agen memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi keuangan dibandingkan dengan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Hal ini membuat masyarakat kesulitan mengevaluasi secara objektif kinerja pemerintah daerah. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki gambaran yang akurat tentang sejauh mana pemerintah daerah mengelola keuangan mereka secara efisien dan bertanggung jawab.

Informasi asimetri ini menyebabkan potensi rendahnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas yang memadai, masyarakat tidak dapat menilai apakah dana publik digunakan dengan efektif dan efisien. Selain itu, informasi asimetri dapat mengakibatkan ambiguitas dalam evaluasi akuntabilitas dan melemahkan kepercayaan publik akibat kurangnya transparansi informasi keuangan yang diberikan pemerintah kepada publik (Kamalia & Firmansyah, 2024). Ketika laporan keuangan pemerintah daerah tidak mencapai standar opini WTP,

hal ini mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan dalam proses akuntansi dan pengendalian internal yang menghambat pengelolaan keuangan yang baik. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada persepsi masyarakat, tetapi juga dapat mempengaruhi alokasi sumber daya dan keputusan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. Masalah ini menegaskan perlunya investigasi lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian sebelumnya yang telah menguji kinerja keuangan pemerintah diantaranya menggunakan ukuran daerah (Firmansyah, 2024; Kiswanto & Fatmawati, 2019; Nugraheni & Adi, 2020; Nugroho & Prasetyo, 2018), tindak lanjut hasil audit (Kiswanto & Fatmawati, 2019), ketergantungan keuangan daerah (Firmansyah, 2024; Firmansyah et al., 2024; Siswanto & Maylani, 2022), derajat desentralisasi fiskal (Ahyaruddin & Amrillah, 2018), kekayaan daerah (Muhtar, 2022), akuntabilitas pengelolaan keuangan (Muhtar, 2022), rasio efektivitas keuangan (Putra et al., 2020), rasio efisiensi keuangan (Ahyaruddin & Amrillah, 2018; Putra et al., 2020), belanja daerah (Nugroho & Prasetyo, 2018), leverage (Nugraheni & Adi, 2020), kemandirian daerah (Ahyaruddin & Amrillah, 2018; Burhan et al., 2022; Ratnasari & Meirini, 2022), tingkat ketergantungan daerah (Firmansyah, 2024; Firmansyah et al., 2024; Nugraheni & Adi, 2020; Ratnasari & Meirini, 2022), belanja modal (Firmansyah, 2024; Firmansyah et al., 2024; Muhtar, 2022; Ratnasari & Meirini, 2022) tata kelola pemerintah (Hutapea & Widyarningsih, 2017) dan ukuran legislatif (Hutapea & Widyarningsih, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kemandirian pemerintah daerah, ketergantungan daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks teori keagenan, kemandirian pemerintah daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, dan belanja modal dianggap mempengaruhi bagaimana pemerintah daerah sebagai agen menjalankan perannya dalam mengelola keuangannya. Kemandirian yang tinggi harus didukung oleh sistem pengendalian yang kuat untuk menghindari moral hazard, sementara ketergantungan berlebih dapat mengurangi insentif bagi agen untuk bertindak efisien. Belanja modal, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menambah kompleksitas dalam evaluasi kinerja keuangan oleh masyarakat sebagai prinsipal. Tingkat kemandirian daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dan memenuhi kebutuhan fiskal serta administratif secara mandiri, tanpa ketergantungan yang besar pada dana dari pemerintah pusat (Yuliansyah et al., 2023). Burhan et al. (2022) menemukan bahwa tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, Ahyaruddin & Amrillah (2018) dan Ratnasari & Meirini (2022) menyimpulkan bahwa menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah daerah tidak berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah. Inkonsistensi hasil pengujian tersebut menunjukkan perlunya investigasi lebih lanjut mengenai pengaruh kemandirian pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana pusat memiliki beberapa konsekuensi yang signifikan terhadap kemandirian, fleksibilitas, dan efektivitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya (Yuliansyah et al., 2023). Firmansyah (2024), Firmansyah et al. (2024) dan Ratnasari & Meirini (2022) menyimpulkan bahwa tingkat ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, Nugraheni & Adi (2020) menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat tidak terbukti mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya mengindikasikan adanya inkonsistensi dalam temuan mengenai hubungan antara tingkat ketergantungan pemerintah daerah dan kinerja keuangan mereka. Inkonsistensi ini mendorong pengujian ulang pengaruh ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah perlu untuk dilakukan.

Selanjutnya, implementasi belanja modal pemerintah daerah yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik, mendukung pembangunan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Yuliansyah et al., 2023). Firmansyah et al. (2024) dan Ratnasari & Meirini (2022) menunjukkan hasil bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi secara positif oleh belanja modal. Namun hasil penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Firmansyah (2024) menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Muhtar (2022) dan Nugraheni & Adi (2020) menunjukkan hasil bahwa belanja modal tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Variasi hasil dari pengujian sebelumnya

mendorong pentingnya dilakukan kembali penelitian mengenai pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini juga memasukkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel moderasi, yang masih jarang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Variabel ini merujuk pada opini yang diberikan oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pihak independen yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya. Laporan keuangan dengan kualitas baik biasanya ditandai dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah melalui proses audit yang ketat. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan fungsi keuangan dengan transparansi, kredibilitas, dan akuntabilitas tinggi, sesuai dengan peran mereka sebagai agen dalam teori keagenan, di mana masyarakat bertindak sebagai prinsipal. Teori ini menekankan pentingnya penyusunan dan publikasi laporan keuangan yang baik agar masyarakat sebagai prinsipal dapat mengevaluasi kinerja agen mereka dengan akurat.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyajikan LKPD setiap tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LKPD ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukur kinerja operasional pemerintah tetapi juga menjadi sarana evaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan entitas keuangan serta implementasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Azahari & Sulardi, 2021). Penerapan standar akuntansi berbasis akrual, yang telah diterapkan sejak 2015, diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Namun, Firmansyah et al. (2022) menekankan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang belum mampu mematuhi standar akuntansi ini, mengakibatkan rendahnya kualitas laporan keuangan yang disusun. Kualitas laporan keuangan yang tinggi diharapkan mencerminkan akurasi, ketepatan waktu, serta penyajian yang obyektif dan lengkap (Saputra & Firmansyah, 2024).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan erat dengan kinerja keuangan yang dicerminkan dalam laporan tersebut. Hal ini dapat terlihat dari hasil audit BPK yang dilakukan setiap tahun. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk melaporkan pertanggungjawaban atas penggunaan dan pelaksanaan anggaran dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK. Laporan keuangan ini setidaknya harus mencakup Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (Calk). Hutapea & Widyaningsih (2017) mengungkapkan bahwa pelaporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 01 berguna bagi pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan.

Selanjutnya, Nuryani & Firmansyah (2020) menunjukkan bahwa transparansi merupakan elemen penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan akuntabilitas. Akrom & Firmansyah (2017) menegaskan bahwa penerimaan opini audit yang baik, seperti WTP, memiliki dampak positif pada transparansi laporan keuangan, menunjukkan bahwa opini audit dapat menjadi tolok ukur yang andal dalam menilai kualitas laporan keuangan. Yuniar & Firmansyah (2023) menekankan bahwa belanja modal yang dialokasikan untuk layanan penting dapat mendorong peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Firmansyah et al. (2022) menekankan bahwa transparansi dalam penyajian informasi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi sektor publik dapat meningkatkan kualitas laporan. Meskipun akuntansi berbasis akrual telah diterapkan, tantangan dalam kepatuhan masih ada, sehingga perbaikan dalam transparansi menjadi penting untuk memastikan peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu yang menjadi pertimbangannya adalah bahwa jumlah pengaduan masyarakat yang signifikan kepada Ombudsman perwakilan Sumatera Selatan di tahun 2019 menunjukkan adanya kekurangan dalam pelayanan dan penyampaian informasi oleh instansi pemerintah daerah kepada masyarakat (Munajar, 2019). Dengan instansi pemerintah daerah menjadi objek aduan terbanyak (27 persen), hal ini mencerminkan bahwa masyarakat masih merasakan ketidakpuasan terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan. Pengaduan yang didominasi oleh

masalah maladministrasi, seperti "penundaan berlarut" dan "penyalahgunaan wewenang", mengindikasikan adanya keterlambatan dan ketidaktepatan dalam proses pelayanan yang seharusnya berjalan efektif dan transparan (Munajar, 2019). Kondisi ini juga mencerminkan kelemahan dalam penyampaian informasi dan aksesibilitas layanan kepada masyarakat. Kurangnya informasi yang memadai dapat meningkatkan risiko asimetri informasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, di mana masyarakat kesulitan mendapatkan kejelasan dan pemahaman terkait layanan publik yang disediakan. Upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik sangat penting agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pemantauan pelayanan publik. Adanya laporan yang tidak diproses karena ketidaklengkapan data juga menunjukkan bahwa sistem pengaduan dan mekanisme pelayanan informasi perlu diperbaiki (Munajar, 2019).

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

Teori keagenan, sebagaimana didefinisikan oleh Jensen & Meckling (1976) menggambarkan kontrak antara prinsipal, yaitu pihak yang memiliki sumber daya, dan agen, yang bertugas mengelola sumber daya tersebut. Dalam konteks pemerintah daerah, agen adalah pemerintah daerah itu sendiri, sedangkan masyarakat berperan sebagai prinsipal. Agen diharapkan mampu mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai kepentingan prinsipal, yakni pelayanan publik yang optimal dan pembangunan berkelanjutan (Azahari & Sulardi, 2021). Namun, potensi konflik dapat terjadi jika agen tidak mengelola sumber daya tersebut secara transparan dan akuntabel, menyebabkan asimetri informasi di mana masyarakat kesulitan menilai kinerja agen secara objektif (Muhtar, 2022).

Kinerja keuangan pemerintah daerah diartikan sebagai kemampuan daerah dalam mengelola anggarannya secara efisien dan efektif untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Firmansyah, 2024). Selain itu, Anasta & Ambarwati (2023) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah ukuran yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran anggaran untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan. Kinerja ini diukur melalui berbagai indikator yang mencakup pencapaian anggaran, efektivitas belanja modal, dan opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin menunjukkan bahwa agen telah berhasil mengelola sumber daya sesuai dengan harapan prinsipal (Safitry et al., 2021). Tingkat kemandirian daerah merupakan salah satu indikator penting yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mendanai kebutuhan belanja dan program pembangunan dengan PAD tanpa terlalu mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat (Purnomo & Danuta, 2022). Kemandirian ini mengindikasikan kapasitas daerah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk menghasilkan pendapatan. Kemandirian keuangan yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kontrol yang lebih besar dalam perencanaan dan alokasi anggaran, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan (Wijayanti & Suryandari, 2020). Kinerja keuangan yang baik diharapkan dapat menciptakan pemerintahan daerah yang mandiri, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang optimal dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan (Anisman, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Burhan et al. (2022) mengungkapkan bahwa tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penemuan ini menegaskan bahwa daerah yang memiliki kemandirian keuangan yang tinggi cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Pemerintah daerah yang mandiri lebih mampu mengatur alokasi sumber daya secara fleksibel dan inovatif sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Dalam kerangka teori keagenan, peningkatan PAD sebagai representasi kemandirian keuangan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan yang dikumpulkan dari masyarakat dan mengembalikannya dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik. Dengan demikian, peningkatan kemandirian keuangan tidak hanya mengurangi ketergantungan pada dana pusat tetapi juga menciptakan ruang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan transparansi dalam pelaporan.

H₁ :Tingkat kemandirian pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Dalam konteks teori keagenan, masyarakat bertindak sebagai prinsipal, sementara pemerintah daerah berperan sebagai agen yang diberi wewenang untuk mengelola sumber daya keuangan lokal demi kepentingan prinsipal (Nuryani & Firmansyah, 2020). Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dana yang diterima secara efisien guna mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Azahari & Sulardi, 2021; Muhtar, 2022). Teori keagenan juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam hubungan antara agen dan prinsipal. Ketergantungan yang tinggi pada dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan untuk mendukung pemerataan keuangan antar-daerah, berpotensi menurunkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Ketergantungan ini sering kali mengurangi insentif bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena aliran dana yang besar dari pusat dapat melemahkan upaya otonomi dalam pengelolaan keuangan. Akibatnya, pemerintah daerah mungkin kurang termotivasi untuk memaksimalkan kinerja keuangan mereka sendiri (Noviyanti & Kiswanto, 2016; Nugraheni & Adi, 2020).

Kinerja keuangan pemerintah dianggap merupakan kemampuan daerah dalam mengelola anggaran untuk mendukung pembangunan dan menyediakan layanan publik yang berkelanjutan (Firmansyah et al., 2024). Kinerja ini menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mencapai sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan yang efektif ditunjukkan dengan pencapaian target belanja serta penggunaan sumber daya secara optimal. Agar kinerja keuangan optimal, pemerintah daerah perlu memiliki kemandirian dalam pengelolaan keuangan tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dana dari pemerintah pusat (Safitry et al., 2021). Ketergantungan yang tinggi pada dana pusat, terutama DAU menunjukkan lemahnya kemampuan daerah untuk mengembangkan pendapatan asli. Hal ini dapat mengakibatkan ketergantungan yang tinggi pada sumber daya dari pusat, yang membatasi inisiatif daerah dalam mengelola sumber dayanya sendiri (Noviyanti & Kiswanto, 2016; Nugraheni & Adi, 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya mendukung pandangan bahwa ketergantungan berlebih pada dana pusat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Firmansyah (2024), Firmansyah et al. (2024) dan Ratnasari & Meirini (2022), menunjukkan bahwa ketergantungan tinggi pada dana pusat berhubungan negatif dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Ketergantungan ini cenderung menurunkan motivasi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD, yang berdampak pada rendahnya efektivitas pengelolaan keuangan.

H₂: Tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, termasuk belanja modal, untuk meningkatkan kinerja keuangan yang akan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam kerangka teori keagenan, belanja modal berperan penting dalam mendukung kinerja keuangan pemerintah daerah karena digunakan untuk mengakuisisi dan meningkatkan aset yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Belanja modal sebagai pengeluaran yang menambah aset daerah dan memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran (Peraturan Pemerintah RI, 2010). Belanja modal meliputi investasi dalam infrastruktur seperti tanah, bangunan, jalan, dan irigasi, yang semuanya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan memacu pembangunan daerah (Ratnasari & Meirini, 2022).

Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dan menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, dan transparan (Anisman, 2021). Pengelolaan yang baik terhadap anggaran, terutama dalam belanja modal, menunjukkan efektivitas daerah dalam menjalankan fungsinya dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat (Safitry et al., 2021). Belanja modal, yang sering kali digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan aset publik lainnya, menjadi salah satu bentuk nyata pengeluaran pemerintah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik (Firmansyah, 2024). Dengan mengalokasikan anggaran untuk belanja modal, pemerintah daerah dapat membangun dan mengembangkan aset tetap yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing wilayah. Hal ini sejalan dengan harapan bahwa investasi dalam aset publik akan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan melalui efisiensi dan optimalisasi layanan masyarakat (Nugraheni & Adi, 2020).

Firmansyah et al. (2024) dan Ratnasari & Meirini (2022) menunjukkan bahwa pengeluaran belanja modal yang dialokasikan dengan tepat berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal yang digunakan untuk meningkatkan aset daerah dapat mendukung efisiensi operasional dan memberikan manfaat yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan pengelolaan belanja modal yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja keuangan mereka.

H₃: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Dalam teori keagenan, hubungan keagenan terjadi ketika pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang mengelola sumber daya ekonomi atas nama masyarakat sebagai prinsipal (Nuryani & Firmansyah, 2020). Tingkat kemandirian daerah, yang tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi indikator penting dari kinerja keuangan pemerintah daerah. PAD yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tidak bergantung pada dana dari pemerintah pusat dan mampu memobilisasi sumber daya lokalnya untuk mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat (Azahari & Sulardi, 2021). Terkait dengan hal tersebut, kualitas laporan keuangan memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan ini.

Kualitas laporan keuangan yang baik, yang diindikasikan oleh opini audit seperti wajar tanpa pengecualian (WTP), menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam mengelola sumber daya. Akrom & Firmansyah (2017) menekankan bahwa opini audit yang positif dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dengan baik. Dengan laporan keuangan yang berkualitas, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat lebih yakin bahwa PAD digunakan secara efektif, yang pada akhirnya memperkuat kinerja keuangan pemerintah daerah. Firmansyah et al. (2022) menggarisbawahi bahwa pemerintah daerah dengan laporan keuangan berkualitas cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik, karena adanya dorongan untuk bertanggung jawab dan transparan dalam pengelolaan keuangan daerah.

H₄: Kualitas laporan keuangan memperkuat pengaruh positif tingkat kemandirian pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Tingkat ketergantungan pada dana pusat, terutama dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), seringkali mengurangi motivasi pemerintah daerah untuk mengembangkan sumber pendapatan lokal seperti PAD. Ketergantungan yang tinggi ini berpotensi menciptakan moral hazard, di mana pemerintah daerah lebih cenderung mengandalkan transfer dari pusat daripada mengoptimalkan pendapatan sendiri (Muhtar, 2022). Namun, kualitas laporan keuangan yang tinggi dapat membantu mengurangi dampak negatif ini. Laporan keuangan yang berkualitas, yang diverifikasi melalui audit independen seperti yang dilakukan oleh BPK, mencerminkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan menciptakan dorongan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya pusat secara bertanggung jawab (Nuryani & Firmansyah, 2020).

Firmansyah et al. (2024) menekankan bahwa pemerintah daerah yang memiliki kualitas laporan keuangan tinggi cenderung lebih termotivasi untuk meningkatkan PAD dan meminimalkan ketergantungan pada transfer pusat. Selain itu, laporan keuangan yang berkualitas dapat berfungsi sebagai alat kontrol, di mana pemerintah pusat dan masyarakat dapat menilai apakah dana yang diterima dari pusat digunakan dengan efektif untuk mendukung kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan yang baik dapat memperlemah dampak negatif ketergantungan pada dana pusat terhadap kinerja keuangan, mendorong pemerintah daerah untuk lebih mandiri dan proaktif dalam mengoptimalkan sumber daya lokalnya (Akrom & Firmansyah, 2017; Noviyanti & Kiswanto, 2016).

H₅: Kualitas laporan keuangan memperlemah pengaruh negatif tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Belanja modal merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur (Yuniar & Firmansyah, 2023). Alokasi

belanja modal yang efektif memungkinkan pemerintah daerah untuk memperoleh aset berwujud yang berfungsi meningkatkan pelayanan masyarakat, seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Teori keagenan menyatakan bahwa pemerintah daerah sebagai agen bertanggung jawab untuk mengelola dana dengan efisien untuk kepentingan publik, atau prinsipal (Nuryani & Firmansyah, 2020). Kualitas laporan keuangan yang baik menjadi krusial dalam memperkuat dampak positif belanja modal terhadap kinerja keuangan, karena laporan yang baik memungkinkan masyarakat untuk menilai efektivitas dan efisiensi belanja modal yang dilakukan.

Menurut Firmansyah et al. (2022), pemerintah daerah dengan opini WTP pada laporan keuangannya cenderung lebih efektif dalam mengelola belanja modal, karena adanya tekanan untuk mempertahankan opini tersebut dengan pengelolaan keuangan yang baik. Selain itu, Yuniar & Firmansyah (2023) menegaskan bahwa belanja modal untuk layanan publik utama memiliki dampak signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Transparansi ini, yang terlihat dalam laporan keuangan berkualitas, memberikan dorongan bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa belanja modal dialokasikan secara optimal, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan dapat memperkuat hubungan positif antara belanja modal dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₆: Kualitas laporan keuangan memperkuat pengaruh positif belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Metodologi penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2007 hingga 2021. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2007 hingga 2021. Data bersumber dari www.djpk.kemenkeu.go.id dan www.bpk.go.id. Dengan menggunakan metode purposive sampling, sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria berikut:

Tabel 1. Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah
Pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang memiliki laporan Keuangan bulan Juni 2024	18
Pemerintah kabupaten/kota yang pemekaran dan/atau penggabungan	3
Pemerintah kabupaten/kota yang laporan keuangannya bisa digunakan	15
Periode penelitian (2007 s.d 2021)	15
Jumlah sampel	225

Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio yang digunakan pada penelitian ini bersumber pada penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti & Suryandari (2020) yakni:

$$KKP = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}}$$

Variabel independen dalam penelitian ini merupakan tingkat kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, dan belanja modal. Tingkat kemandirian daerah diukur menggunakan proksi yang digunakan oleh Wijayanti & Suryandari (2020) yakni:

$$TKP = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Tingkat ketergantungan pada penelitian ini mengikuti proksi yang digunakan oleh Noviyanti & Kiswanto (2016) yaitu:

$$TKPP = \frac{\text{Dana Alokasi Umum (DAU)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Belanja modal pada penelitian ini menggunakan proksi yang digunakan oleh Firmansyah et al. (2022) sebagai berikut.

$$BM = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Realisasi Total Belanja}}$$

Variabel moderasi pada penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan diukur menggunakan opini audit BPK. Variabel ini menggunakan proksi dummy sebagaimana Firmansyah et al. (2022). Laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) mendapatkan skor 1, sedangkan laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapat opini selain wtp mendapatkan skor 0.

Penelitian ini menganalisis data menggunakan metode regresi linier berganda dengan pendekatan data panel. Model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KKP_{it} = \alpha_0 + \beta_1 TKP_{it} + \beta_2 TKPP_{it} + \beta_3 BM_{it} + \beta_4 KLK_{it} + \beta_5 (TKP_{it} * KLK_{it}) + \beta_6 (TKPP_{it} * KLK_{it}) + \beta_7 (BM_{it} * KLK_{it}) + \varepsilon_{it}$$

Di mana:

- KKP_{it} = kinerja keuangan pemerintah daerah i
- TKP_{it} = tingkat kemandirian pemerintah daerah i
- TKPP_{it} = tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat i
- BM_{it} = belanja modal pemerintah daerah i
- KLK_{it} = kualitas laporan keuangan pemerintah daerah i

4. Hasil dan pembahasan

Penelitian ini terdapat lima variabel yang diteliti yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, dan belanja modal. Berikut ini uji statistik deskriptif untuk mengetahui nilai rata-rata (mean), nilai median, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi.

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std.Dev	Obs
KKP	1,0181	1,0199	1,3538	0,2995	0,0934	225
TKP	0,1003	0,0627	0,8868	0,0149	0,1184	225
TKPP	0,4178	0,4496	0,6620	0,0000	0,1412	225
BM	0,2964	0,2804	0,5900	0,0626	0,0899	225
KLK	0,5955	1,0000	1,0000	0,0000	0,4918	225

KKP = kinerja keuangan pemerintah daerah; TKP = tingkat kemandirian pemerintah daerah; TKPP = tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat; BM = belanja modal; SIZE = ukuran pemerintah daerah; RE = belanja pemerintah daerah; KLK = kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKP) menunjukkan bahwa rata-rata kinerja keuangan berada pada angka 1,0181, dengan nilai tertinggi sebesar 1,3538 dan terendah 0,2995. Penyebaran data atau variabilitasnya berada pada angka 0,0934, yang menggambarkan seberapa baik pemerintah daerah dapat mengelola sumber dayanya secara finansial. Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah (TKP) memiliki rata-rata 0,1003, yang menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah masih bergantung pada sumber dana eksternal. Nilai kemandirian tertinggi mencapai 0,8868, sementara yang terendah adalah 0,0149, dengan variasi sebesar 0,1184. Tingkat Ketergantungan kepada Pemerintah Pusat (TKPP) memiliki rata-rata 0,4178, dengan nilai maksimum sebesar 0,6620 dan minimum 0,0000. Variasi sebesar 0,1412 menunjukkan perbedaan tingkat ketergantungan yang cukup bervariasi antar daerah.

Belanja Modal (BM) menunjukkan bahwa rata-rata proporsi belanja modal di tingkat pemerintah daerah adalah 0,2964, dengan rentang nilai dari 0,0626 hingga 0,5900. Angka ini mencerminkan bahwa

sebagian besar anggaran daerah diarahkan untuk belanja modal, dengan tingkat variasi sebesar 0,0899. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLK) memiliki rata-rata 0,5955, yang menunjukkan bahwa sebagian besar daerah telah memenuhi standar tertentu dalam pelaporan keuangan, dengan nilai tertinggi 1,0000 dan terendah 0,0000. Standar deviasi sebesar 0,4918 mengindikasikan perbedaan signifikan dalam kualitas pelaporan keuangan di antara daerah. Selanjutnya, hasil uji hipotesis adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Uji Hipotesis

Variable	Coef	t-Stat.	Prob	
C	1,2109	25,2699	0,0000	***
TKP	-0,1823	-1,6028	0,0552	*
TKPP	-0,1127	-1,7628	0,0397	**
BM	-0,3716	-4,4128	0,0000	***
KLK	-0,0463	-2,4145	0,0083	***
TKP*KLK	0,2216	1,6458	0,0506	*
TKPP*KLK	1,4033	1,3766	0,0851	*
BM*KLK	-6,3794	-1,6267	0,0526	*
R ²		0,169273		
Adj. R ²		0,142476		
F-stat.		6,316730		
Prob(F-stat.)		0,000001		

***)Tingkat signifikan 1%, **)Tingkat signifikan 5%, *)Tingkat signifikansi 10%

4.1 Pengaruh tingkat kemandirian pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat kemandirian daerah ternyata berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang berbeda dari temuan Burhan et al. (2022), yang menunjukkan pengaruh positif di mana tingkat kemandirian yang tinggi seharusnya meningkatkan kinerja keuangan. Selain itu, hasil ini juga tidak sejalan dengan penelitian Ahyaruddin & Amrillah (2018) dan Ratnasari & Meirini (2022), yang menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak berkorelasi secara signifikan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Periode 2007 hingga 2021 menunjukkan perkembangan dan variasi dalam kemandirian finansial serta kinerja keuangan di Sumatera Selatan. Berdasarkan data deskriptif, kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan rata-rata sebesar 1,0181, dengan rentang dari 0,2995 hingga 1,3538, yang mencerminkan tingkat pengelolaan keuangan yang beragam di wilayah tersebut. Begitu pula, tingkat kemandirian keuangan daerah yang diukur melalui rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, menunjukkan rata-rata yang rendah, yaitu 0,1003, dengan variasi cukup lebar dari 0,0149 hingga 0,8868. Ini mengindikasikan ketergantungan yang tinggi pada dana pusat di sebagian besar daerah di Sumatera Selatan selama periode tersebut.

Ketergantungan besar pada dana pusat ini mungkin memengaruhi hasil pengujian kemandirian daerah terhadap kinerja keuangan yang menunjukkan hubungan negatif. Secara teoritis, kemandirian yang lebih tinggi seharusnya berdampak positif pada kinerja keuangan, karena daerah yang mandiri memiliki kontrol yang lebih besar dalam pengalokasian anggaran dan prioritas pembangunan. Namun, rendahnya PAD dalam konteks Sumatera Selatan menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan keseluruhan masih belum cukup kuat. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan basis ekonomi lokal, rendahnya kapasitas pemungutan pajak daerah, atau kurangnya inovasi dalam menggali sumber-sumber PAD baru.

Berdasarkan statistik deskriptif, meskipun ada upaya peningkatan kemandirian di Sumatera Selatan, kontribusi PAD terhadap total pendapatan tetap rendah, yang berimplikasi pada kinerja keuangan yang kurang optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan besar bagi daerah-daerah untuk mencapai kemandirian finansial tanpa ketergantungan yang kuat pada pusat. Selain itu, kondisi ini juga memperlihatkan bahwa perlunya peningkatan strategi untuk memperkuat PAD dan kapasitas fiskal, sehingga kemandirian finansial dapat mendukung peningkatan kinerja keuangan.

Penelitian ini, kemandirian daerah diukur melalui rasio antara PAD dan total pendapatan. Daerah dianggap semakin mandiri ketika PAD, yang mencakup pajak, retribusi, dan hasil kekayaan daerah, mendominasi pendapatan dari transfer pusat. Kemandirian finansial ini dianggap sebagai indikator kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan publik melalui pengelolaan sumber daya lokal secara efektif. Namun, hasil negatif pada hubungan kemandirian dan kinerja di Sumatera Selatan mengindikasikan bahwa besarnya kontribusi PAD masih belum memadai. Hal ini mungkin diakibatkan oleh rendahnya penerimaan dari sektor pajak dan retribusi yang belum mampu menopang belanja daerah yang dibutuhkan untuk pelayanan publik dan pembangunan.

Kerangka teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976), hubungan antara masyarakat (prinsipal) dan pemerintah daerah (agen) mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya guna mencapai kepentingan publik. Kemandirian finansial melalui PAD seharusnya mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan yang dikumpulkan dari masyarakat dan memberikan layanan publik yang optimal. Namun, ketika PAD masih rendah dan kurang memberikan dampak signifikan, pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan masyarakat sebagai prinsipal. Oleh karena itu, kemandirian yang lebih besar diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada pusat dan memungkinkan pengelolaan yang lebih responsif sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, meskipun kemandirian finansial diharapkan meningkatkan kinerja keuangan, kondisi di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa rendahnya PAD membatasi kemampuan daerah dalam mencapai kinerja optimal. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD dan strategi yang lebih efektif diperlukan untuk memperkuat kemandirian dan efisiensi pengelolaan keuangan di tingkat daerah.

4.2 Pengaruh tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan teori keagenan, di mana masyarakat berperan sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen, terdapat harapan bahwa pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya lokal dengan efisien dan akuntabel untuk mencapai kesejahteraan publik (Nuryani & Firmansyah, 2020). Sebagai agen, pemerintah daerah seharusnya memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk memenuhi kebutuhan pembangunan lokal secara mandiri. Namun, ketergantungan pada dana pusat sering kali melemahkan akuntabilitas serta inisiatif pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD sebagai indikator otonomi fiskal.

Ketergantungan yang tinggi pada transfer pusat dapat mengurangi dorongan pemerintah daerah untuk berinovasi dalam meningkatkan PAD. Ketika DAU terus mengalir, motivasi untuk mengembangkan pendapatan dari sumber-sumber lokal, seperti pajak dan retribusi, sering kali berkurang. Hal ini sejalan dengan pernyataan Noviyanti & Kiswanto (2016) dan Nugraheni & Adi (2020) yang menyatakan bahwa ketergantungan pada dana pusat dapat melemahkan inisiatif daerah dalam mengelola sumber daya finansial secara mandiri. Dengan tingginya proporsi DAU dalam struktur pendapatan daerah, upaya untuk mengembangkan kapasitas keuangan lokal melalui PAD dapat terhambat, sehingga pemerintah daerah cenderung kurang efektif dalam pengelolaan anggaran mereka.

Kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi target anggaran, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan menyediakan layanan publik yang berkelanjutan (Firmansyah et al., 2024). Ketika pemerintah daerah terlalu bergantung pada dana pusat, kapasitas mereka untuk mandiri dalam pengelolaan keuangan akan terbatas. Hal ini menciptakan risiko pengelolaan keuangan yang kurang optimal karena minimnya dorongan untuk inovasi, efisiensi, dan optimalisasi sumber daya lokal (Safitry et al., 2021).

Hasil pengujian dalam penelitian ini sejalan dengan temuan dari Firmansyah (2024), Firmansyah et al. (2024) dan Ratnasari & Meirini (2022). Ketergantungan tinggi ini dianggap membatasi inisiatif pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan

meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, temuan ini mendukung perspektif bahwa daerah yang lebih mandiri secara fiskal cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan daerah yang sangat bergantung pada transfer pusat. Strategi peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan PAD dapat menjadi solusi untuk mendorong kinerja keuangan yang lebih berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memfokuskan upaya pada peningkatan PAD dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat agar tercipta pengelolaan keuangan yang mandiri, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

4.3 Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini konsisten dengan penelitian Firmansyah (2024), yang juga menemukan bahwa alokasi belanja modal tidak memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belanja modal diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui pengadaan atau peningkatan aset yang diharapkan memberikan manfaat jangka panjang, alokasi tersebut ternyata tidak berhubungan langsung dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dalam konteks teori keagenan, hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen menunjukkan adanya ekspektasi bahwa pemerintah daerah akan mengelola sumber daya secara efisien dan transparan demi kesejahteraan masyarakat (Azahari & Sulardi, 2021). Namun, ketika alokasi belanja modal dilakukan tanpa perencanaan strategis dan pengelolaan yang optimal, akuntabilitas pemerintah daerah sebagai agen dapat menurun. Ketergantungan pada belanja modal untuk proyek-proyek yang mungkin kurang relevan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat mengindikasikan kelemahan dalam pengelolaan dana publik.

Nuryani & Firmansyah (2020) juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pengalokasian belanja modal. Mereka mengungkapkan bahwa kualitas pelaporan keuangan dan transparansi yang tinggi membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya daerah. Dengan demikian, belanja modal yang tidak diarahkan pada proyek-proyek produktif atau yang tidak dikelola secara efektif dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan menurunkan akuntabilitas pemerintah daerah. Pengelolaan belanja modal yang kurang efektif dapat mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan proyek yang kurang tepat sasaran, di mana belanja modal yang tidak meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau memberikan manfaat langsung kepada masyarakat akan gagal dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu, meskipun belanja modal dialokasikan dengan harapan dapat memperbaiki pelayanan publik, hasil penelitian ini menekankan bahwa alokasi yang tidak tepat sasaran malah berpotensi menurunkan efisiensi pengelolaan keuangan. Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang cermat dan evaluasi yang berkelanjutan dalam alokasi belanja modal. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap alokasi belanja modal benar-benar berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan dan tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban alokasi anggaran.

4.4 Peran moderasi kualitas laporan keuangan atas pengaruh tingkat kemandirian pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan memiliki peran dalam memperlemah pengaruh negatif tingkat kemandirian pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan. Dalam konteks ini, kualitas laporan keuangan berfungsi sebagai faktor yang mengurangi dampak negatif dari rendahnya tingkat kemandirian keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Teori keagenan menggambarkan pemerintah daerah sebagai agen yang ditunjuk oleh masyarakat untuk mengelola sumber daya keuangan lokal secara efektif demi kepentingan publik (Nuryani & Firmansyah, 2020). Kemandirian keuangan daerah, yang tercermin dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah indikator kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggarannya sendiri tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. PAD yang lebih tinggi seharusnya mendukung otonomi daerah dan berdampak positif pada kinerja keuangan, karena memberikan kontrol lebih besar dalam pengelolaan anggaran sesuai kebutuhan lokal.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kemandirian tersebut bersifat negatif terhadap kinerja keuangan, yang mengindikasikan bahwa PAD di beberapa daerah mungkin belum cukup kuat untuk memberikan dampak positif langsung. Dalam hal ini, kualitas laporan keuangan menjadi faktor moderasi yang krusial. Laporan keuangan berkualitas tinggi, misalnya melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor, menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah, yang meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap efektivitas penggunaan PAD, meskipun kontribusinya masih terbatas (Akrom & Firmansyah, 2017; Azahari & Sulardi, 2021).

Firmansyah et al. (2022) menyatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas baik tidak hanya mendukung transparansi tetapi juga memitigasi kekurangan yang mungkin muncul akibat rendahnya kemandirian keuangan. Dengan adanya laporan keuangan yang andal dan akuntabel, masyarakat dapat lebih yakin bahwa pemerintah daerah menggunakan PAD secara efisien, yang berpotensi memperkuat kinerja keuangan meskipun PAD masih rendah. Sebaliknya, rendahnya kualitas laporan keuangan dapat memperburuk efek negatif dari rendahnya kemandirian, karena masyarakat mungkin meragukan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dana. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan memainkan peran moderasi dalam hubungan antara kemandirian dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan yang tinggi membantu mengurangi dampak negatif dari kemandirian yang rendah dengan meningkatkan kepercayaan publik dan transparansi, sehingga mendukung pemerintah daerah dalam mempertahankan kinerja keuangan yang lebih stabil dan akuntabel.

4.5 Peran moderasi kualitas laporan keuangan atas pengaruh tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan mampu memperlemah dampak negatif ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat terhadap kinerja keuangan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa, meskipun ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat cenderung mengurangi dorongan pemerintah daerah untuk mengembangkan pendapatan asli mereka, kualitas laporan keuangan yang baik dapat mengurangi dampak negatif tersebut. Ketika laporan keuangan daerah memiliki kualitas tinggi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pusat menjadi lebih terjaga, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan lebih efektif. Dalam konteks teori keagenan, hubungan antara pemerintah pusat (sebagai prinsipal) dan pemerintah daerah (sebagai agen) menjadi relevan. Ketika pemerintah pusat memberikan dana transfer, mereka berharap agar pemerintah daerah menggunakan dana tersebut untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, ketergantungan yang tinggi pada dana pusat sering kali mengurangi insentif pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka sendiri, yang pada akhirnya bisa berdampak pada kinerja keuangan yang kurang optimal.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berperan sebagai faktor moderasi yang penting. Dengan laporan keuangan yang berkualitas baik, yang ditandai dengan opini audit yang positif seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pemerintah daerah menunjukkan adanya upaya transparansi dan akuntabilitas yang kuat dalam pengelolannya. Kualitas laporan keuangan yang tinggi berfungsi sebagai pengendalian internal yang mendorong pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dan memastikan bahwa dana yang diterima dari pusat digunakan secara efektif dan efisien. Akrom & Firmansyah (2017) menyatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sehingga memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya mereka secara mandiri.

Terkait dengan hal tersebut, Firmansyah et al. (2024) mendukung temuan ini, bahwa pemerintah daerah dengan kualitas laporan keuangan yang baik cenderung lebih termotivasi untuk memanfaatkan dana pusat secara efektif dan berupaya mengurangi ketergantungan mereka pada dana eksternal. Kualitas laporan keuangan yang tinggi menciptakan mekanisme kontrol, di mana pemerintah pusat, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memonitor pengelolaan dana dengan lebih mudah. Dengan

demikian, kualitas laporan keuangan yang baik tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab dalam memanfaatkan dana pusat, yang pada akhirnya membantu meningkatkan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya kualitas laporan keuangan sebagai moderasi dalam hubungan antara ketergantungan pada pemerintah pusat dan kinerja keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan yang baik membantu pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dengan lebih bertanggung jawab, sehingga menyeimbangkan dampak negatif dari ketergantungan yang tinggi.

4.6 Peran moderasi kualitas laporan keuangan atas pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan memperkuat pengaruh negatif belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang mengindikasikan bahwa alokasi belanja modal yang besar tidak selalu berkontribusi positif terhadap kinerja, terutama jika tidak didukung oleh kualitas pelaporan yang memadai. Belanja modal adalah instrumen penting yang digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan infrastruktur, seperti pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan. Belanja modal yang dikelola dengan baik dapat menciptakan aset jangka panjang yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk memastikan dampak positif dari belanja modal, pemerintah daerah perlu menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel agar masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat menilai efektivitas penggunaan anggaran tersebut.

Dalam perspektif teori keagenan, pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang ditugaskan oleh masyarakat (prinsipal) untuk mengelola sumber daya keuangan yang digunakan bagi kepentingan publik (Nuryani & Firmansyah, 2020). Sebagai agen, pemerintah daerah diharapkan mengelola belanja modal secara optimal dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar mendukung kepentingan masyarakat. Kualitas laporan keuangan yang baik memainkan peran penting dalam memastikan transparansi ini, memberikan keyakinan bagi masyarakat bahwa pemerintah daerah mengelola dana publik dengan benar.

Penelitian Firmansyah et al. (2022) menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangannya lebih berkomitmen untuk menjaga pengelolaan keuangan yang akuntabel, termasuk dalam pengelolaan belanja modal. Kualitas laporan keuangan yang baik memungkinkan masyarakat dan pemerintah pusat untuk memantau alokasi belanja modal dengan lebih baik, yang mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana secara optimal. Menurut Yuniar & Firmansyah (2023), belanja modal yang diarahkan pada layanan publik utama memiliki pengaruh signifikan terhadap transparansi, yang tercermin dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selama periode 2007 hingga 2021, kabupaten/kota di Sumatera Selatan menunjukkan variasi dalam kinerja keuangan dan kualitas laporan keuangan mereka. Walaupun rata-rata kualitas laporan keuangan menunjukkan nilai yang baik, terdapat perbedaan yang cukup besar antar daerah, yang tercermin dalam statistik deskriptif. Variasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan di berbagai daerah. Kinerja keuangan daerah selama periode tersebut juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya finansial mereka secara efektif. Meskipun belanja modal mencakup proporsi yang cukup besar dari anggaran, efektivitasnya dalam mendukung kinerja keuangan dapat berbeda tergantung pada kualitas pelaporan keuangan di masing-masing daerah. Dengan demikian, kualitas pelaporan yang baik memungkinkan pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan alokasi belanja modal mereka secara lebih transparan dan meningkatkan akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat lebih percaya pada pengelolaan keuangan yang dilakukan. Hal ini menyoroti pentingnya bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelaporan mereka agar belanja modal benar-benar dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan beberapa hubungan penting antara tingkat kemandirian, ketergantungan pada dana pusat, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah serta bagaimana kualitas laporan keuangan memainkan peran moderasi dalam hubungan-hubungan tersebut. Tingkat kemandirian memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Meskipun daerah memiliki otonomi fiskal melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), kontribusi PAD belum cukup kuat untuk mendukung kinerja keuangan daerah secara signifikan. Ketergantungan yang masih tinggi pada dana dari pemerintah pusat memperlihatkan tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam memaksimalkan PAD untuk mendukung otonomi fiskal dan meningkatkan kinerja keuangan.

Pengaruh tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah juga menunjukkan hubungan negatif. Ketergantungan tinggi pada dana pusat, terutama melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), justru menurunkan kinerja keuangan. Ketergantungan ini seringkali mengurangi dorongan pemerintah daerah untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli seperti pajak daerah dan retribusi. Dengan menurunnya upaya untuk meningkatkan PAD, daerah mengalami hambatan dalam mencapai kemandirian fiskal, yang berdampak pada kualitas kinerja keuangan. Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah memberikan hasil yang serupa, yakni adanya pengaruh negatif. Belanja modal yang dialokasikan untuk infrastruktur dan pelayanan publik seharusnya meningkatkan kualitas pelayanan dan, pada akhirnya, kinerja keuangan daerah. Namun, hasil ini mengindikasikan bahwa alokasi belanja modal yang tidak direncanakan dan dikelola dengan baik dapat menghambat efisiensi dan efektivitas anggaran. Akibatnya, belanja modal tidak berkontribusi secara optimal terhadap peningkatan kinerja keuangan. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa kualitas laporan keuangan memperlemah dampak negatif dari rendahnya tingkat kemandirian terhadap kinerja keuangan. Dengan laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah daerah mampu menyajikan PAD dan pengelolaan keuangan dengan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Meskipun tingkat kemandirian masih terbatas, kualitas laporan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas publik. Selain itu, laporan keuangan yang berkualitas terbukti mampu memperlemah dampak negatif ketergantungan pada pemerintah pusat. Kualitas pelaporan yang tinggi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang membantu mengurangi risiko moral hazard dan memotivasi pemerintah daerah untuk mengelola dana pusat secara bertanggung jawab. Hal ini membantu daerah mempertahankan kinerja keuangan yang lebih baik, meskipun ketergantungan terhadap dana pusat masih tinggi. Terakhir, kualitas laporan keuangan dapat memperkuat dampak positif belanja modal pada kinerja keuangan. Dengan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, masyarakat dapat melihat bagaimana belanja modal benar-benar dialokasikan untuk proyek-proyek yang efektif dan berdampak langsung pada pelayanan publik. Kualitas laporan keuangan yang baik memastikan bahwa belanja modal dimanfaatkan dengan efisien, sehingga membantu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Limitasi Penelitian

Keterbatasan penelitian ini mencakup beberapa aspek. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan dalam periode 2007 hingga 2021, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mewakili kondisi daerah lain di Indonesia yang memiliki karakteristik ekonomi dan fiskal berbeda. Keterbatasan wilayah ini bisa mempengaruhi generalisasi hasil penelitian, terutama terkait dengan faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Sumatera Selatan, seperti ketergantungan tinggi pada dana pusat atau keterbatasan dalam kapasitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua, penelitian ini menggunakan variabel kualitas laporan keuangan sebagai moderasi tanpa memperhitungkan aspek lain dari kualitas pengelolaan keuangan yang mungkin juga berperan, seperti kompetensi aparatur pemerintah, inovasi dalam pengelolaan pendapatan, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi efektivitas belanja modal, kemandirian keuangan, dan ketergantungan pada dana pusat, tetapi belum dianalisis secara menyeluruh dalam penelitian ini. Ketiga, data yang digunakan terbatas pada laporan keuangan daerah yang mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan kinerja daerah secara menyeluruh, terutama karena kemungkinan adanya data yang belum sepenuhnya akurat atau keterbatasan dalam penilaian efektivitas pengelolaan anggaran daerah secara *real-time*.

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan di atas, saran untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas cakupan wilayah penelitian dengan menggunakan daerah lain di Indonesia agar hasilnya dapat lebih digeneralisasi. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mempertimbangkan variabel tambahan yang relevan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, analisis longitudinal dengan periode yang lebih panjang serta pendekatan kualitatif yang mendalam dapat dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja keuangan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu karena adanya bantuan orang-orang yang dilibatkan dalam penelitian ini, seperti masyarakat yang menjadi responden, pemerintah daerah, maka dari itu peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kontribusi orang-orang yang terlibat dalam penyelesaian penelitian ini. Khususnya ucapan terima kasih disampaikan kepada UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bantuan biaya untuk penyelesaian penelitian ini.

Referensi

- Ahyaruddin, M., & Amrillah, M. F. (2018). Faktor penentu kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 471–468. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9028>
- Akrom, J., & Firmansyah, A. (2017). The moderating effect of audit opinion on the local government financial performances and the disclosure compliance of financial information. *AFEBI Accounting Review (AAR)*, 2(2), 68–82. <https://doi.org/10.47312/aar.v2i02.98>
- Anasta, L., & Ambarwati, V. (2023). Menganalisis program kinerja pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Serang: Studi Kabupaten dan Kota Serang 2017-2021. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 3(1), 31–36. <https://doi.org/10.35912/rambis.v3i1.2219>
- Anisman, H. B. (2021). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pada pusat pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 1(2), 77–90. <https://doi.org/10.35912/rambis.v1i2.408>
- Azahari, A. Y. P., & Sulardi, S. (2021). Pengaruh temuan audit, audit opini, dan ukuran daerah terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(2), 294–304. <https://doi.org/10.20961/jab.v21i2.655>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2024). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023*. <https://www.bpk.go.id/ihps/2023/II>
- Burhan, M., Kartini, K., & Said, D. (2022). Pengaruh kemandirian keuangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. *Al-Buhuts*, 18(2), 296–310. <https://doi.org/10.30603/ab.v18i2.2946>
- Firmansyah, A. (2024). Kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia: belanja modal, tingkat ketergantungan dan ukuran daerah. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.33827/akurasi2024.vol6.iss1.art194>
- Firmansyah, A., Arfiansyah, Z., & Huda, A. M. (2024). The characteristics and financial performance of local governments in Indonesia: The moderating role of financial health level. *Accounting Analysis Journal*, 13(2), 85–94. <https://doi.org/10.15294/aaj.v13i2.1894>
- Firmansyah, A., Yuniar, M. R., & Arfiansyah, Z. (2022). Kualitas laporan keuangan di Indonesia: transparansi informasi keuangan dan karakteristik pemerintah daerah. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 4(2), 181–197. <https://doi.org/10.33827/akurasi2022.vol4.iss2.art180>
- Hutapea, H. L., & Widyaningsih, A. (2017). Pengaruh good government governance dan ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah (studi pada pemerintah provinsi di Indonesia). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(1), 173–186. <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5446>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kamalia, A., & Firmansyah, A. (2024). Peran moderasi kepemimpinan dalam pengujian akuntabilitas kinerja pemerintah. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 5(4), 311–325. <https://doi.org/10.35912/jakman.v5i4.3228>
- Kiswanto, K., & Fatmawati, D. (2019). Determinan kinerja pemerintah daerah: ukuran pemda, leverage,

- temuan audit, dan tindak lanjutnya. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 44–54. <https://doi.org/10.33603/jka.v3i1.1689>
- Muhtar, M. (2022). Belanja daerah, kekayaan daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah: studi empiris di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 8(1), 89–102. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap/article/download/8325/pdf>
- Munajar, A. (2019). *Ombudsman Sumsel terima 128 pengaduan masyarakat*. <https://www.antaraneews.com/berita/1213348/ombudsman-sumsel-terima-128-pengaduan-masyarakat>
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto, K. (2016). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.15294/aaj.v5i1.9759>
- Nugraheni, E., & Adi, P. H. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah: studi meta analisis. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 19–42. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.4398>
- Nugroho, T. R., & Prasetyo, N. E. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 27–34. <https://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1823>
- Nuryani, N., & Firmansyah, A. (2020). Determinants of transparency in financial management on local government websites : evidence from Indonesia. *Humanities and Social Sciences Letters*, 8(2), 145–155. <https://doi.org/10.18488/journal.73.2020.82.145.155>
- Peraturan Pemerintah RI. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Purnomo, S. D., & Danuta, K. S. (2022). Analisis kemampuan keuangan daerah terhadap kemiskinan: studi empiris di Sumatera Utara. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 215–220. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.513>
- Putra, R., Wijayanti, R. R., & Ardhiarisca, O. (2020). Measurement of regional government financial performance in Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 22(1), 83–94. <https://doi.org/10.34208/jba.v22i1.619>
- Ratnasari, D., & Meirini, D. (2022). Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan silpa dalam pengaruhnya kinerja keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 17(1), 38–47. <https://doi.org/10.37058/jak.v17i1.6737>
- Safitry, H. A., Luhsasi, D. I., & Permatasari, C. L. (2021). Analysis of financial statement in assessing the financial performance of local government. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 13(2), 65–71. <https://doi.org/10.23969/jrak.v13i2.3955>
- Saputra, R., & Firmansyah, A. (2024). The impact of ethic and competence on audit quality (accountability as moderating variable). *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi*, 5(2), 179–196. <https://doi.org/10.35912/simo.v5i2.3335>
- Siswanto, S., & Maylani, D. A. (2022). Analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(1), 130–138. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.48423>
- Undang-Undang RI. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Wijayanti, Y., & Suryandari, D. (2020). The effect of regional characteristics, leverage, government complexity, bpk audit findings and opinions on local government financial performance. *Accounting Analysis Journal*, 9(1), 30–37. <https://doi.org/10.15294/aaj.v9i1.22483>
- Yuliansyah, R., Wasif, S. K., Pratama, B., & Krisnando, K. (2023). Pengelolaan dana transfer dan saldo anggaran lebih terhadap belanja modal pemerintah daerah Jawa Barat. *Goodwood Akuntansi Dan Auditing Reviu*, 2(1), 13–25. <https://doi.org/10.35912/gaar.v2i1.2576>
- Yuniar, M. R., & Firmansyah, A. (2023). The transparency level of local governments in Indonesia: does the level of financial health matter? *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 9(1), 123–150. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v9i1.1195>